



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Analisis Aksesibilitas Pada Angkutan Umum Bus Damri
Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung

Skripsi

Oleh:

Aldee Regi Rizqilloh

2015310008

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisis Aksesibilitas Pada Angkutan Umum Bus Damri Bagi
Penyandang Disabilitas di Kota Bandung**
Skripsi

Oleh

Aldee Regi Rizqilloh

2015310008

Pembimbing

Maria Rosarie Triastuti, S.IP., M.Si.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Aldee Regi Rizqilloh
Nomor Pokok : 2015310008
Judul : Analisis Aksesibilitas Pada Angkutan Umum Bus Damri Bagi
Penyandang Disabilitas di Kota Bandung

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana Pada
Rabu, 30 Juli 2020

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Indraswari, M.A., Ph.D.

Sekretaris

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

Anggota

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldee Regi Rizqilloh

NPM : 2015310008

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Analisis Aksesibilitas Pada Angkutan Umum Bus Damri Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Ada pun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Garut, 18 Juli 2020



METERAI
TEMPEL
4F241AHF547193100
6000
RUPIAH
Aldee Regi Rizqilloh

Aldee Regi Rizqilloh

Cek plagiarisme BAB 1-6 Skripsi

ORIGINALITY REPORT

21 %	13 %	4 %	19 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

Berikut adalah indeks kemiripan dari penelitian yang peneliti lakukan, dengan nilai sebesar

21%

ABSTRAK

Nama : Aldee Regi Rizqilloh

NPM : 2015310008

Jurusan/ Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Analisis Aksesibilitas Pada Angkutan Umum Bus Damri Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung

Aksesibilitas merupakan kemudahan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas penyandang disabilitas sangat penting keberadaannya karena dapat membantu masyarakat penyandang disabilitas untuk memenuhi kehidupannya. Dalam hal tersebut, pemerintah Kota Bandung telah menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas dalam angkutan umum. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya, aksesibilitas terdapat indikasi masalah berupa kurangnya sarana yang seharusnya disediakan untuk mempermudah penyandang disabilitas dalam menggunakan angkutan umum bus Damri. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan Dimensi aksesibilitas dari Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum No. 30 Tahun 2006, yaitu 1) aksesibilitas keselamatan, 2) aksesibilitas kemudahan, 3) aksesibilitas kegunaan, serta 4) aksesibilitas kemandirian. Kemudian peneliti menggunakan teori tingkatan aksesibilitas oleh Anne Chamberlain dkk (2017) untuk menentukan tingkatan dari aksesibilitas angkutan umum bus Damri di Kota Bandung yang meliputi 1) Exemplary Accessible, dan 2) Accessible yang termasuk Fully Accessible, kemudian 3) Partially Accessible dan 4) Not Accessible yang termasuk Not Fully Accessible.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Observasi terhadap tempat-tempat publik dan fasilitas angkutan umum bus Damri dilakukan sampai bulan Maret karena terjadi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi lapangan; 2) Wawancara secara mendalam kepada 8 orang penyandang disabilitas (tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, dan tuna daksa), 1 orang dari Dinas Perhubungan, serta 1 orang dari Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, dan juga kepada 2 orang masyarakat umum; 3) Studi dokumen yaitu Perda Kota Bandung No. 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Cacat, serta Pekerjaan Umum No. 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi aksesibilitas belum memenuhi kriteria ideal. Dimensi yang belum terealisasi dengan baik adalah Aksesibilitas Keselamatan, Aksesibilitas Kegunaan, dan Aksesibilitas Kemandirian dengan 4 aspek yang belum terealisasi dengan baik, serta Aksesibilitas Kemudahan dengan 6 aspek yang belum terealisasi. Kemudian pada tingkatan aksesibilitas, Aksesibilitas keselamatan, Aksesibilitas kegunaan, serta Aksesibilitas kemandirian dengan 4 aspeknya yang menempati tingkatan Not Fully Accessible, serta Aksesibilitas kegunaan dengan 6 aspeknya yang menempati tingkatan Not Fully Accessible. Temuan menunjukkan bahwa aksesibilitas pada angkutan umum bus Damri masih belum semua terpenuhi dari berbagai dimensi bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Analisis Aksesibilitas, Tingkatan Aksesibilitas, Dimensi Aksesibilitas, Angkutan Umum, Penyandang Disabilitas

ABSTRACT

Name : Aldee Regi Rizqilloh
NPM : 2015310008
Major : Public Administration
Title : *Analysis of Public Transportation Damri Buses Accessibility for Disabled People in Bandung*

Accessibility is convenience in all aspect of life and living. Accessibility for disabilities is very important because it can help people with disabilities to fulfill their lives. In this regard, the government of Bandung City has provided accessibility for people with disabilities, including accessibility in public transportation. However, in its implementation, there is an indication of accessibility problems in the lack of facilities that should be provided to facilitate persons with disabilities in using Damri bus public transportation. To answer the research question, researcher used the Accessibility Dimension of Government Regulation Public Works No. 30 of 2006, namely 1) Safety Accessibility, 2) Ease of Accessibility, 3) Usability Accessibility, and 4) Independence of Accessibility. Then researchers used the theory of accessibility levels by Anne Chamberlain et al (2017) to determine the level of accessibility of Damri bus public transportation in Bandung which included 1) Exemplary Accessible, and 2) Accessible which included Fully Accessible, then 3) Partially Accessible and 4) Not Accessible which includes Not Fully Accessible.

The method used in this research is descriptive qualitative research method. Data collection techniques used in this study were by 1) Observation of public places and public transportation facilities until March due to the Covid-19 Pandemic which did not allowed researcher to conduct field observation; 2) Interviews with 8 persons with disabilities (blind, deaf, speech impaired, and physically impaired), 1 people from the Transportation Agency, 1 people from the Social Service and Poverty Prevention in Bandung and also to 2 people in general; 3) Document study, namely Bandung City Regulation No. 26 of 2009 concerning Equality and Disability Empowerment. and Public Works No. 30 of 2006 concerning Technical Guidelines for Facilities and Accessibility in Buildings and Environments.

The results of this study indicate that the dimension of accessibility does not meet the ideal criteria, Dimension that do not have been realized, namely Safety Accessibility, Usefulness Accessibility, and Accessibility Independence with 4 aspect that do not meet the criteria, and then Convenience Accessibility with 6 aspects that do not meet the criteria. Then at the level of accessibility, Safety Accessibility, Usefulness Accessibility, and Accessibility Independence with 4 aspects that occupy the level of not fully accessible, and Convenience Accessibility with 6 aspects that occupy the level of Not Fully Accessible. Findings indicate that accessibility of public transportation Damri buses still not all met from various aspect for person with disabilities.

Keywords: *Analysis evaluation, Accessibility level, Accessibility Dimension, Public Transportation, People with Disabilities*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan berkat-Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ilmiah ini dengan judul “*Analisis Aksesibilitas Pada Angkutan Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Bandung*”.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak berupa saran, bimbingan, maupun petunjuknya. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang utama dan yang pertama, karena lewat izinnyalah dan Berkat-Nya peneliti dapat menyelesaikan Seminar ini.
2. Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
3. Trisno Sakti Herwanto. S.I.P., MPA. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
4. Maria Rosarie Harni Triastuti. S.IP., M. Si. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini serta senantiasa meluangkan waktu dalam membantu penulis menyusun skripsi ini.
5. Orang tua penulis, yang selalu membimbing dan mendoakan penulis memberikan contoh agar menjadi manusia yang lebih baik dan bertanggung jawab.
6. Kedua kakak perempuan kembar saya yaitu Lucki Nelson dan Luckeu Parker yang senantiasa memberikan dorongan, do'a, serta arahannya. Dan berkat mereka pula, penulis bisa membereskan skripsi ini.
7. Teman-teman MBHKNG yang selalu menemani hari-hari penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.

8. Teman-teman ACAABLE yang selalu memberikan suprotnya kepada saya dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Geusanwira, Ezra, Delpiero, Harry, Fadil, Gaffin, Riki yang turut membantu dalam pengerjaan sekaligus memberikan arahan kepada penulis.
10. Bunga Febriyani yang selalu memberikan bantuan dan mengingatkan penulis akan pengerjaan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Teman-teman saya di Garut yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu yang telah menemani dan berjasa dalam membantu pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah memberi balasan atas kebaikan serta bantuan yang telah mereka berikan kepada peneliti, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dengan lancar dapat dilanjutkan menjadi sebuah Skripsi.

Garut 29 Juni 2020

Peneliti



Aldee Regi Rizqilloh

2015310008

DAFTAR PUSTAKA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR PUSTAKA	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABLE	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.2.1 Akses Menuju dan dari Tempat Pemberhentian Angkutan Umum.....	7
1.2.2 Di dalam Angkutan Umum.....	10
1.2.3 Akses untuk memasuki halte pemberhentian angkutan umum yang memiliki bentuk bangunan belum aksesible bagi penyandang disabilitas.....	11
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	13
1.6 Struktur Penelitian.....	14
BAB II.....	16
KERANGKA TEORI	16
2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	16
2.2 Konsep Aksesibilitas	18
2.2.1. Dimensi Aksesibilitas	19
2.2.2. Tingkatan Aksesibilitas	23
2.2.3. Persyaratan Aksesibilitas	24
2.2.4. Penyediaan Aksesibilitas	29
2.3 Kerangka Berpikir	30
BAB III.....	31
METODOLOGI PENELITIAN.....	31

3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
3.2	Lokasi Penelitian.....	32
3.3	Sumber Data.....	32
3.3.1	Sumber Data Primer.....	32
3.3.2	Sumber Data Sekunder.....	33
3.4	Peran Peneliti.....	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6	Teknik Analisis Data.....	38
3.7	Uji Keabsahan Data.....	40
3.8	Operasionalisasi Variabel.....	42
BAB IV	47
OBYEK PENELITIAN	47
4.1	Profil Dinas Perhubungan Kota Bandung.....	47
4.1.1	Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bandung.....	47
4.1.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	47
4.1.3	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	49
4.1.4	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	49
4.1.5	Angkutan Umum di Kota Bandung.....	50
4.1.6	Bus Damri di Kota Bandung.....	50
4.2	Profil Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.....	51
4.2.1	Visi dan Misi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.....	51
4.2.2	Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung 53	
4.2.3	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.....	53
4.2.4	Penyandang Disabilitas di Kota Bandung.....	54
BAB V	57
PEMBAHASAN PENELITIAN	57
5.1	Profil Informan.....	57
5.1.1	Jenis Kelamin.....	57
5.1.2	Tingkat Usia.....	58
5.1.3	Kategori Informan.....	58
5.2	Dimensi Aksesibilitas.....	59
5.2.1	Aksesibilitas Keselamatan.....	59
5.2.2	Aksesibilitas Kemudahan.....	88
5.2.3	Aksesibilitas Kegunaan.....	111
5.2.4	Aksesibilitas Kemandirian.....	133

5.3	Analisis Tingkat Aksesibilitas.....	158
5.3.1	Tingkat Aksesibilitas Keselamatan	158
5.3.2	Analisis Aksesibilitas Kemudahan	171
5.3.3	Analisis Tingkatan Aksesibilitas Kegunaan	184
5.3.4	Analisis Tingkatan Aksesibilitas Kemandirian	196
BAB VI	211
KESIMPULAN DAN SARAN	211
6.1	Kesimpulan.....	211
6.2	Saran.....	214
DAFTAR PUSTAKA	216
LAMPIRAN	219

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Akses saluran air yang mengganggu mobilitas.....	8
Gambar 1.2 Ramp curam di Halte Pasopati.....	9
Gambar 1.3 Interior Bus Damri	10
Gambar 1.4 Bentuk bangunan halte di Jalan BKR Bandung tidak aksesible	11
Gambar 4.1 Tabel Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung.....	49
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung	53

DAFTAR TABLE

Table 2.1 Indikator Penilaian Ramp Terhadap Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Menggunakan Angkutan Umum.....	25
Table 2.2 Indikator Penilaian Tangga Terhadap Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Menggunakan Angkutan Umum.....	26
Table 2.3 Indikator Penilaian Pedestrian Terhadap Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Menggunakan Angkutan Umum.....	27
Tabel 3.1 Operasional Variabel	42
Table 4.1 Trayek dan Jumlah Bus Damri Kota Bandung	50
Table 4.2 Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Bandung	54
Table 5.1 Jumlah dan persentase jenis kelamin informan	57
Table 5.2 Jumlah dan persentase tingkat usia informan	58
Table 5.3 Jumlah dan persentase informan.....	59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1 Persentase Aksesibilitas Keselamatan tangga naik/turun.....	62
Grafik 5.2 Persentase Aksesibilitas Keselamatan tempat duduk	66
Grafik 5.3 Persentase Aksesibilitas Keselamatan signage atau tanda-tanda	69
Grafik 5.4 Persentase Aksesibilitas Keselamatan akses ke	73
Grafik 5.5 Persentase Aksesibilitas Keselamatan fasilitas	76
Grafik 5.6 Persentase Aksesibilitas Keselamatan fasilitas	80
Grafik 5.7 Persentase Aksesibilitas Keselamatan pelayanan informasi	83
Grafik 5.8 Persentase Aksesibilitas Keselamatan pelayanan khusus.....	87
Grafik 5.9 Persentase Aksesibilitas Kemudahan tangga naik/ turun	90
Grafik 5.10 Persentase Aksesibilitas Kemudahan tempat duduk	93
Grafik 5.11 Persentase Aksesibilitas Kemudahan tanda-tanda atau signage.....	97
Grafik 5.12 Persentase Aksesibilitas Kemudahan akses ke tempat pemberhentian bus/ kendaraan	100
Grafik 5.13 Persentase Aksesibilitas Kemudahan fasilitas tempat parkir dan naik turun penumpang.....	103
Grafik 5.14 Persentase Aksesibilitas Kemudahan fasilitas tempat.....	105
Grafik 5.15 Persentase Aksesibilitas Kemudahan pelayanan informasi.....	108
Grafik 5.16 Persentase Aksesibilitas Kemudahan pelayanan khusus	110
Grafik 5.17 Persentase Aksesibilitas Kegunaan tangga naik/ turun	114
Grafik 5.18 Persentase Aksesibilitas Kegunaan tempat duduk	116
Grafik 5.19 Persentase Aksesibilitas Kegunaan signage atau tanda-tanda.....	119
Grafik 5.20 Persentase Aksesibilitas Kegunaan akses ke tempat	121
Grafik 5.21 Persentase Aksesibilitas Kegunaan fasilitas tempat	124
Grafik 5.22 Persentase Aksesibilitas Kegunaan fasilitas tempat	126

Grafik 5.23 Persentase Aksesibilitas Kegunaan pelayanan informasi.....	129
Grafik 5.24 Persentase Aksesibilitas Kegunaan pelayanan khusus	132
Grafik 5.25 Persentase Aksesibilitas Kemandirian tangga naik/ turun.....	135
Grafik 5.26 Persentase Aksesibilitas Kemandirian tempat duduk.....	139
Grafik 5.27 Persentase Aksesibilitas Kemandirian signage atau tanda-tanda	142
Grafik 5.28 Persentase Aksesibilitas Kemandirian akses ke	145
Grafik 5.29 Persentase Aksesibilitas Kemandirian fasilitas tempat	148
Grafik 5.30 Persentase Aksesibilitas Kemandirian fasilitas	151
Grafik 5.31 Persentase Aksesibilitas Kemandirian pelayanan informasi	154
Grafik 5.32 Persentase Aksesibilitas Kemandirian pelayanan khusus	157

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang tidak berkebutuhan khusus. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, penyandang disabilitas perlu mendapatkan perlakuan khusus agar tidak terjadinya berbagai tindakan diskriminasi baik disengaja maupun tidak disengaja, dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dinilai sebagai upaya yang dilakukan pemerintah bagi penyandang disabilitas agar dapat memaksimalkan perlindungan, pemajuan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Difabel atau *People with Different Ability* adalah istilah bagi seseorang yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan baik dalam fisik maupun mental. Penyandang disabilitas saat ini sangat membutuhkan kemudahan dalam menjalankan kesehariannya, sebagaimana seperti masyarakat lainnya yang membutuhkan pertolongan saat menyebrangi jalan ataupun seperti kita yang saat ini sangat membutuhkan teknologi dalam melakukan sesuatu. Tetapi poin yang ingin penulis sampaikan adalah bagaimana pentingnya sebuah kemudahan bagi penyandang disabilitas yang mengharapkan atau membutuhkan sebuah pertolongan yang dapat membantu mereka, meskipun terdapat beberapa masyarakat penyandang disabilitas

yang tidak mau dibantu karena dengan alasan ingin membuktikan bahwa dirinya dapat melalui hal tersebut dan tidak ingin dipandang sebelah mata. Namun, bagaimana dengan penyandang disabilitas lain yang setiap harinya menunggu untuk mendapat pertolongan. Sangat berat rasanya jika harus melalui kesehariannya dengan keterbatasan yang mereka punya. Maka dari itu sangat dibutuhkan bantuan dari pemerintah dengan semaksimal dari segi sarana dan prasarana yang dapat membantu masyarakat penyandang disabilitas.

Diskriminasi bagi masyarakat penyandang disabilitas masih tetap terjadi, dan dalam menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia memberikan sebuah payung hukum untuk penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran untuk membantu masyarakat penyandang disabilitas agar mereka dapat mandiri dalam menjalani kehidupannya. Dalam menanggapi hal tersebut, pemerintah membuat sebuah peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Kemudian dicantumkan pada pasal 3 ayat (a) bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk “mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara”.

Dari pasal tersebut, dijelaskan bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya, tidak adanya pembedaan maupun diskriminasi dalam peraturan tersebut. Karena, Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bertumpu kepada fisik, agama, suku, maupun gender. Tetapi pada kenyataannya,

masyarakat penyandang disabilitas masih mendapat perlakuan yang tidak layak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih belum tersedia secara keseluruhan.

Pemerintah Kota Bandung sendiri mempunyai sebuah peraturan yang membahas tentang penyandang disabilitas. Peraturan tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Penyandang Cacat. Dalam menanggapi kesetaraan hak dan kewajiban bagi penyandang disabilitas, Kota Bandung dalam Perda Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Penyandang Cacat tersebut mencantumkan pernyataan bahwa penyandang cacat memiliki kesamaan hak dan kesempatan serta meningkatkan kemampuan penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, ini tertera dalam Pasal 3 Ayat 1.

Dalam Perda Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Penyandang Cacat pada pasal 28 dikatakan bahwa Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. Dengan adanya pernyataan tersebut, pemerintah Kota Bandung sudah menjamin segala kebutuhan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan dan penghidupannya agar dapat lebih mandiri di Kota Bandung. Yang dimaksud aksesibilitas dalam Perda Kota Bandung tersebut adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pernyataan tersebut tertera dalam pasal 1 ayat 8.¹ Aksesibilitas itu sendiri juga merupakan kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Dalam upaya Penyediaan Aksesibilitas, dapat berbentuk Fisik dan Non-Fisik. Aksesibilitas yang berbentuk fisik meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, angkutan umum, sarana keagamaan. Sedangkan untuk aksesibilitas yang berbentuk non-fisik meliputi pelayanan informasi dan pelayanan khusus. Ini tercantum pada Perda Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dalam Pasal 30 Ayat 2 sampai 4. Dengan disebutkannya pasal-pasal tersebut, pemerintah Kota Bandung sudah menyatakan bahwa hak dan kesempatan dalam bentuk penyediaan aksesibilitas sudah terjamin bagi penyandang cacat oleh Kota Bandung. Maka dari itu, pemerintah Kota Bandung harus menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Di Kota Bandung, pemerintah kota Bandung dalam lima tahun terakhir sudah melakukan revitalisasi terhadap sejumlah fasilitas publik diantaranya, fasilitas Taman Inklusi, Gor Bandung, Puskesmas Ramah Difabel, dan bahkan pemerintah Kota Bandung saat ini menyediakan bus ramah disabilitas yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas. Bus tersebut diluncurkan pada tanggal 17 September 2019. Bus ramah disabilitas ini diluncurkan sebagai wujud perhatian dari Pemerintah Kota

¹ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat

Bandung agar penyandang disabilitas dapat menggunakan angkutan umum secara nyaman.²

Dengan adanya bus ramah disabilitas di Kota Bandung mengidentifikasi bahwa masyarakat penyandang disabilitas tidak bisa menggunakan pelayanan angkutan umum biasa seperti Angkutan Kota (angkot), Bus Trans Metro Bandung (TMB), dan Bus Damri. Seharusnya aksesibilitas pada angkutan umum di Kota Bandung telah terpenuhi dengan adanya Perda Kota Bandung No. 26 tahun 2009 tersebut, tetapi pada kenyataannya belum semua sarana dan fasilitas tersebut optimal diberikan kepada masyarakat penyandang disabilitas, seperti sarana ramp, guiding block, dan lain-lain yang dapat membantu masyarakat penyandang disabilitas menggunakan angkutan umum bus Damri.

Pelaksanaan dalam penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dibutuhkan beberapa sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah, baik itu berbentuk fisik maupun non-fisik. Dalam Perda Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dalam pasal 34 angkutan umum harus menyediakan Tangga naik atau turun, kemudian tempat duduk, dan tanda-tanda atau signage. Yang dimaksud dengan tangga naik atau turun digunakan untuk memasuki angkutan umum tersebut, kemudian untuk tempat duduk memang sudah

² Sony Teguh Prasatya, "Bus Ramah Disabilitas Segera Beroperasi di Kota Bandung", Humas Bandung, diakses dari <https://humas.bandung.go.id/layanan/bus-ramah-disabilitas-segera-beroperasi-di-kota-ba>, pada tanggal 31 Juli 2020 pukul 15.32

seharusnya disediakan oleh pemerintah, dan untuk signage diperlukan untuk mengetahui informasi-informasi yang terdapat di angkutan umum tersebut. Sedangkan untuk yang berbentuk non-fisik, diperlukan sebuah pelayanan informasi yang dapat membantu masyarakat penyandang disabilitas dalam menggunakan angkutan umum, dan pelayanan khusus yang dapat memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas dalam menaiki atau menuruni angkutan umum.³

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, terdapat 4 asas didalam fasilitas dan aksesibilitas, yaitu:⁴

1. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
2. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
4. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum

³ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat

⁴ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Dalam Permen PU tersebut dijelaskan bahwa dalam pembuatan fasilitas yang aksesibilitas dibutuhkan 4 asas yang dapat menunjang kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Diantaranya adalah keselamatan bagi penyandang disabilitas, kemudahan dalam menggunakannya, terdapat kegunaan dari fasilitas tersebut, dan dapat memandirikan masyarakat penyandang disabilitas.

1.2 Identifikasi Masalah

Penyediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah untuk memberi hak, mempermudah, dan memandirikan warga penyandang disabilitas yang pada hakekatnya membutuhkan bantuan pemerintah untuk hidup dan berkembang. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa masalah. Berikut adalah penjelasan dari masalah tersebut:

1.2.1 Akses Menuju dan dari Tempat Pemberhentian Angkutan Umum

Angkutan umum saat ini sudah menjadi kebutuhan hidup kita sehari-hari, apalagi bagi masyarakat biasa maupun masyarakat penyandang disabilitas yang bertempat tinggal di Kota besar seperti Kota Bandung ini. Dari halte-halte yang tersebar dan terdapat di Kota Bandung, masih beberapa yang memiliki fasilitas ramah bagi penyandang disabilitas yaitu terdapatnya *ramp* dan *guiding block*.

Gambar 1.1 Akses saluran air yang mengganggu mobilitas bagi penyandang disabilitas



Sumber Foto: Dokumentasi Pribadi

22 Mei 2019 Pukul 14.47

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa jalan trotoar tersebut tidak memberikan rasa aman bagi pejalan kaki khususnya bagi penyandang disabilitas. Dengan tidak adanya guiding block akan menyusahkan penyandang disabilitas tuna netra, ditambah dengan adanya akses saluran air yang dapat menghambat mobilitas masyarakat penyandang disabilitas untuk menjangkau halte atau pemberhentian bus Damri.

Tetapi dalam praktiknya, dengan adanya fasilitas tersebut warga penyandang disabilitas masih memiliki kendala untuk memasuki halte tersebut, seperti masyarakat yang membutuhkan bantuan kursi roda tidak bisa masuk secara mandiri baik kedalam halte maupun kedalam angkutan umum, karena *ramp* yang disediakan terlalu curam

yang tidak memungkinkan untuk dilewati sendiri khususnya bagi yang menggunakan alat bantu kursi roda. Selain itu juga, jarak angkutan umum yang berhenti terlalu jauh dengan halte. Meskipun demikian, masih terdapat kondektur di beberapa angkutan umum yang dapat membantu proses menaiki maupun menuruni angkutan umum tersebut.

Gambar 1.2 *Ramp* curam di Halte Pasopati



Sumber Foto: Dokumentasi Pribadi

22 Mei 2019 Pukul 14.28

1.2.2 Di dalam Angkutan Umum

Dalam memberikan pelayanan secara maksimal, pemerintah harus memikirkan secara matang dalam pembuatan kebijakannya, dan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah tercantum dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan.

Gambar 1.3 Interior Bus Damri



Sumber Foto: Bandungdiary.id

15 Juli 2020 pukul 18.31

Dalam hal ini, angkutan umum yang terdapat di Kota Bandung masih belum tersedia suara pemberhentian khususnya untuk tuna netra dalam memberitahukan bahwa angkutan umum telah sampai di halte tertentu.

1.2.3 Akses untuk memasuki halte pemberhentian angkutan umum yang memiliki bentuk bangunan belum aksesible bagi penyandang disabilitas

Gambar 1.4 Bentuk bangunan halte di Jalan BKR Bandung tidak aksesible



Sumber Foto: Dokumentasi Pribadi

22 Mei 2019 Pukul 13.46

Dalam Pelaksanaanya, pemerintah harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat terlepas dari penyandang disabilitas ataupun tidak. Dalam hal ini terdapat pelayanan yang kurang maksimal dari pihak penyedia fasilitas dalam memberikan akses ke tempat pemberhentian bus. Seperti yang pernah dirasakan oleh informan D,⁵ saat beliau hendak menggunakan fasilitas yang telah diberikan, beliau

⁵ Hasil wawancara dengan D, Penyandang Disabilitas Tuna Daksa (54) pada tanggal 8 Maret 2019

merasa kesulitan dalam menggunakan fasilitas tersebut, seperti yang dapat kita lihat dari foto diatas yang menggambarkan kondisi *ramp* yang berada di jalan BKR atau Halte Taman Tegalega.

Saat saya mewawancarai informan D mengenai fasilitas transportasi angkutan umum bus Damri, beliau mengatakan “*susah sekali untuk menaiki haltenya ya, karena mungkin ramp-nya agak terlalu curam bagi saya...*”⁶. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa dalam menggunakan fasilitas yang telah diberikan terdapat kendala seperti apa yang dirasakan oleh informan D.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan sebelumnya, permasalahan yang terdapat dalam penyediaan aksesibilitas di ruang publik khususnya fasilitas transportasi umum adalah penting karena dalam pengimplementasiannya tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat. Permasalahan ini sudah seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah, karena dalam peraturan tersebut pemerintah sudah menjamin hak dan kesempatan dalam kehidupan warga disabilitas sehari-harinya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁶ Hasil wawancara dengan D, Penyandang Disabilitas Tuna Daksa (54) pada tanggal 8 Maret 2019

“Bagaimana Aksesibilitas pada Angkutan Umum Bus Damri bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Aksesibilitas Keselamatan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung dalam menggunakan angkutan umum bus Damri
2. Aksesibilitas Kemudahan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung dalam menggunakan angkutan umum bus Damri
3. Aksesibilitas Kegunaan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung dalam menggunakan angkutan umum bus Damri
4. Aksesibilitas Kemandirian bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung dalam menggunakan angkutan umum bus Damri
5. Untuk mengetahui tingkatan aksesibilitas dari masing-masing dimensi disabilitas

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut, dan dapat membantu bahan studi terutama dalam kajian mata kuliah Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik.

2. Secara praktik, penelitian ini dapat ditujukan untuk memberikan masukan atau saran bagi Pemerintah Kota Bandung dalam hal penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Masukan ini berupa hasil dari penelitian dan rekomendasi dari penulis sendiri.

1.6 Struktur Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan pembahasan dengan sistematis sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, maksud dan tujuan, dan struktur penulisan.

2. Bab II Kerangka Teori

Bab ini menjelaskan mengenai dasar teori yang peneliti gunakan dalam penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, lokasi penelitian, dan metode pengumpulan data

4. Bab IV Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai profil objek penelitian dan struktur organisasi yang terkait dengan penelitian.

5. Bab V Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai mendeskripsikan hasil temuan penelitian di dinas, ke masyarakat penyandang disabilitas dan ke masyarakat umum, serta analisis data dari hasil temuan tersebut.

6. Bab VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari awal hingga akhir penelitian serta saran yang relevan untuk pengembangan selanjutnya.